



STRATEGI MEWUJUDKAN SWASEMBADA PANGAN BERAS DI INDONESIA: TANTANGAN DAN UPAYA PEMERINTAH TAHUN 2024-2025

Sony Hendra Permana*

Abstrak

Pangan merupakan kebutuhan mendasar manusia yang telah dijamin oleh konstitusi Indonesia. Dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan, pemerintah Indonesia menjadikan swasembada pangan, khususnya beras, sebagai prioritas utama dalam visi pembangunan 2024-2029. Namun, penurunan luas lahan baku sawah dan produksi beras nasional menjadi tantangan signifikan yang dihadapi. Artikel ini membahas upaya pemerintah dalam mengatasi tantangan tersebut, termasuk pemanfaatan benih unggul, optimalisasi dan penambahan lahan pertanian, serta penerapan kebijakan perdagangan yang mendukung ketahanan pangan. Meskipun terdapat kendala teknis seperti distribusi benih unggul dan infrastruktur irigasi yang belum optimal, namun upaya-upaya untuk mencapai swasembada pangan di 2027 telah dilakukan. Oleh karena itu, pendekatan terpadu dari hulu ke hilir diperlukan untuk mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan. Dukungan dari berbagai pihak juga memegang peran penting dalam rangka mendukung produktivitas pertanian. Komisi IV DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap program benih unggul, cetak sawah baru, dan optimalisasi lahan agar sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas pangan.

Pendahuluan

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia dan hak asasi yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang secara merata. Sejalan dengan itu, Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029 telah menetapkan swasembada pangan sebagai prioritas dalam visi Asta Cita dan diharapkan terwujud pada 2027.

Swasembada pangan, khususnya beras, merupakan tujuan strategis dalam mencapai kemandirian pangan dan ketahanan nasional. Namun tantangan besar muncul dengan penurunan luas lahan baku sawah sebesar 80.000 hektare dari 7,46 juta hektare di 2019 menjadi 7,38 juta hektare di 2024. Luas panen padi nasional diperkirakan turun 0,17 juta hektare dari 10,21 juta hektare di 2023 menjadi 10,05 juta hektare di 2024 sehingga produksi beras diperkirakan menurun sebesar 760.000 ton menjadi 30,34 juta ton (Widi, 2025).

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: sony.hendra@dpr.go.id

Salah satu penurunan tersebut adalah konversi atau alih fungsi lahan pertanian, baik sebagian ataupun seluruh kawasan pertanian, sebagai akibat adanya pertumbuhan ekonomi dan penambahan penduduk sehingga kebutuhan lahan seperti tempat tinggal atau tempat usaha meningkat (Sulaiman, 2023). Namun, pemerintah berupaya terus meningkatkan produksi beras dalam rangka mencukupi kebutuhan beras di dalam negeri. Upaya mencapai swasembada dilakukan dengan meningkatkan produksi dan mengendalikan perdagangan, khususnya impor pangan. Tulisan ini membahas upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan swasembada melalui sisi produksi dan pengendalian perdagangannya.

Pemanfaatan Benih Unggul

Untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya beras, salah satu yang dilakukan adalah memanfaatkan benih unggul. Benih unggul adalah varietas padi yang telah melalui proses seleksi dan pemuliaan untuk menghasilkan tanaman dengan karakteristik unggul, seperti hasil panen yang lebih tinggi, ketahanan terhadap hama dan penyakit, serta toleransi terhadap kondisi lingkungan ekstrim seperti kekeringan atau genangan. Di tahun 2025 pemerintah menyiapkan 90 ribu ton benih unggul padi dan jagung untuk 3,7 juta hektar lahan (“Setop Impor Beras”, 2025). Khusus untuk benih padi akan dialokasikan untuk 3 juta hektar lahan, sementara sisanya untuk benih jagung. Penyediaan benih unggul difokuskan pada daerah-daerah dengan indeks pertanaman (IP) yang masih rendah sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas padi sebesar 15-20%.

Namun demikian terdapat berbagai tantangan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan pemanfaatan benih unggul di lapangan, yaitu *pertama*, distribusi dan penyediaan benih unggul dalam jumlah yang besar seringkali terkendala dengan logistik, khususnya di daerah terpencil. *Kedua*, kualitas benih unggul di pasaran tidak semua memiliki sertifikasi resmi sehingga kualitas benih tersebut tidak selalu terjamin. *Ketiga*, sebagian petani masih enggan untuk menggunakan benih unggul karena kurangnya pengetahuan atau adanya pengalaman yang kurang memuaskan penggunaan benih unggul sebelumnya.

Berbagai permasalahan teknis tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian agar berfokus pada penyediaan benih yang berkualitas dan memiliki sertifikat resmi yang beredar di masyarakat. Sistem logistik dalam penyaluran benih unggul juga perlu mendapat perhatian yang serius agar dapat memastikan benih unggul tersebut dapat diperoleh dengan mudah oleh para petani.

Penambahan dan Optimalisasi Lahan Pertanian

Ketersediaan lahan pertanian menjadi kunci utama dari produktivitas pertanian. Meskipun terjadi kecenderungan penurunan lahan baku pertanian, namun pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan ketersediaan lahan guna menjamin pasokan pangan,

khususnya beras. Pada tahun 2025 ini, pemerintah telah menyiapkan program cetak sawah seluas 120 ribu hektar dan optimalisasi 500 ribu hektar lahan pertanian (“Setop Impor Beras,” 2025). Program cetak sawah baru memiliki potensi besar untuk meningkatkan produksi, di mana setiap tambahan 1 juta hektar sawah baru dengan produktivitas rata-rata 5 ton gabah kering panen (GKP) per hektare dapat menambah sekitar 5 juta ton GKP. Program cetak sawah dapat mengimbangi laju kehilangan lahan akibat konversi ke non-pertanian. Pembukaan lahan baru ini juga membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat lokal, terutama di wilayah pedesaan. Namun demikian, pembukaan lahan ini perlu perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur, kualitas tanah, ketersediaan air, konflik lahan, dan dampaknya bagi lingkungan.

Di samping program cetak sawah, optimalisasi terhadap 500 ribu hektare lahan pertanian yang sudah ada juga menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan produktivitas beras. Optimalisasi ini dilakukan dengan membangun atau memperbaiki irigasi untuk meningkatkan frekuensi tanam dari yang sebelumnya hanya 1 kali menjadi 2-3 kali setahun. Untuk mencapai target optimalisasi tersebut pemerintah telah menganggarkan Rp12 triliun yang dialokasikan pada pembangunan dan revitalisasi infrastruktur jaringan irigasi pertanian pada 2025 (Harianto, 2025). Lebih dari 2 juta hektare dari 7,4 juta hektare lahan baku sawah secara nasional belum memiliki irigasi teknis sehingga irigasinya belum optimal (“Produksi Jatim Digenjot,” 2025).

Upaya optimalisasi lahan pertanian juga dapat diupayakan dengan memanfaatkan alat dan mesin pertanian yang lebih modern. Pemanfaatan teknologi seperti drone untuk pemetaan lahan, pemantauan tanaman, dan penyemprotan pupuk atau pestisida secara tepat juga perlu dilakukan agar tercipta sistem pertanian yang lebih presisi. Sebagai contoh Vietnam telah menggunakan *drone* untuk membantu menyuplai air, pupuk, dan insektisida dengan konsentrasi optimal. Nigeria menggunakan *drone* yang dilengkapi dengan *spectrometer* cahaya yang dapat membantu untuk memetakan dan menganalisis tingkat nutrisi dan kadar air di dalam tanah (Sartika, 2024).

Pengendalian Kebijakan Perdagangan

Selain mendorong sisi produksi, untuk mencapai tujuan swasembada pangan, khususnya beras, juga harus memerhatikan pengendalian pada sistem perdagangan pangan khususnya impor. Pada 2024, impor beras Indonesia mencapai 2.928.326 ton yang berasal dari Thailand sebesar 1,04 juta ton, Vietnam 1,02 juta ton, Myanmar 451 ribu ton, dan Pakistan 388 ribu ton (Sandi, 2024). Dalam jangka pendek kebijakan impor memiliki tujuan yang positif, seperti menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pangan (Supriyanto, 2024). Kebijakan perdagangan ini akan memengaruhi ketahanan pangan melalui *pertama*, stabilisasi pasokan pangan. Impor pangan dilakukan untuk mengisi kekurangan pasokan domestik, terutama selama masa kritis seperti bencana, kekeringan, atau gagal panen. *Kedua*, stabilisasi harga pangan. Umumnya harga

akan tinggi jika pasokan domestik terbatas, dengan membuka akses impor maka pemerintah akan dapat menekan lonjakan harga. Ketiga, diversifikasi pangan. Perdagangan internasional memungkinkan masuknya berbagai komoditas pangan yang tidak diproduksi di dalam negeri sehingga membantu diversifikasi pangan.

Kebijakan impor harus dilakukan secara hati-hati karena masuknya beras impor menyebabkan harga gabah lokal turun karena stok yang melimpah, terutama jika impor dilakukan saat musim panen raya. Hal ini membuat pendapatan petani menurun drastis sehingga mengancam keberlanjutan usaha petani. Ketergantungan pada impor juga akan melemahkan insentif bagi petani lokal untuk meningkatkan produksi sehingga dalam jangka panjang akan mengurangi kapasitas produksi domestik dan memperbesar risiko ketergantungan pada pasar internasional. Untuk itu kebijakan impor harus dilakukan hanya dalam jumlah yang diperlukan untuk menutupi defisit pasokan domestik, dengan mempertimbangkan waktu panen raya agar tidak merugikan petani lokal. Pengawasan terhadap impor beras juga perlu dilakukan secara ketat untuk menghindari spekulasi pasar.

Pada tahun 2025 pemerintah telah mengambil kebijakan untuk sementara menghentikan impor produk pangan salah satunya beras. Saat ini Indonesia melalui Perum Bulog masih memiliki cadangan beras yang cukup, mencapai 2 juta ton, yang dapat memenuhi kebutuhan penyaluran seperti bantuan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) beras, serta kebutuhan pemerintah lainnya. Cadangan Bulog juga diperkirakan akan meningkat seiring dengan akan adanya panen raya yang akan berlangsung mulai akhir Februari 2025 (“Indonesia Belum Perlu,” 2025). Namun demikian, kebijakan penghentian impor beras ini tetap harus memerhatikan kondisi cadangan beras dalam negeri. Penghentian kebijakan impor harus diiringi dengan peningkatan kapasitas produksi di dalam negeri. Jika cadangan beras di dalam negeri terbatas sementara kebutuhan lebih besar, maka kebijakan impor beras tetap harus dilakukan untuk meredam lonjakan harga beras di masyarakat.

Penutup

Mewujudkan swasembada pangan, khususnya beras, merupakan prioritas strategis pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan nasional. Penurunan luas lahan baku sawah dan produksi beras nasional menjadi tantangan signifikan yang memerlukan solusi komprehensif. Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai langkah strategis, termasuk penyediaan benih unggul, pembukaan dan optimalisasi lahan pertanian, serta pengendalian kebijakan perdagangan

Pemanfaatan benih unggul diharapkan meningkatkan produktivitas, sementara program cetak sawah baru dan revitalisasi irigasi bertujuan untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan. Kebijakan perdagangan juga difokuskan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan tanpa ketergantungan pada impor beras. Namun demikian, keberhasilan

Penutup

program ini memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah baik pusat maupun daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Selain itu institusi pendidikan juga memegang peran penting, khususnya dalam memberikan inovasi teknologi dalam rangka mendukung produktivitas pertanian. Komisi IV DPR RI dapat berkoordinasi dengan Kementerian atau instansi terkait untuk memastikan terjadinya perbaikan pada sisi produksi pertanian, melakukan pengawasan terhadap program benih unggul, cetak sawah baru, dan optimalisasi lahan agar sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas pangan.

Referensi

- Harianto, M. (2025, Januari 7). Mentan target produksi padi 32 juta ton secara nasional di 2025. *Antara*. <https://www.antaranews.com/berita/4568854/mentan-target-produksi-padi-32-juta-ton-secara-nasional-di-2025>
- Indonesia belum perlu impor beras. (2025, Januari 4). *Bisnis Indonesia*, 4.
- Produksi Jatim digenjot untuk swasembada pangan. (2025, Januari 8). *Kompas*, 11.
- Sandi, F. (2024, November 5). RI impor beras 2,9 juta ton di 2024, paling banyak dari negara ini. *CNBCIndonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241105185910-4-585889/ri-impor-beras-29-juta-ton-di-2024-paling-banyak-dari-negara-ini>
- Sartika, P. (2024, Mei 17). Meningkatkan sistem pertanian dengan teknologi drone. *Greennetwork*. <https://greennetwork.id/kabar/meningkatkan-sistem-pertanian-dengan-teknologi-drone/>
- Setop impor beras, pemerintah tebar 90 ribu ton benih unggul. (2025, Januari 2). *Media Indonesia*, 7.
- Sulaiman, M. F. (2023). Tantangan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Pertanian*, Vol. 4, No. 1, Agustus. <https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/21664>
- Supriyanto, B. E. (2024, Agustus 14). *Dampak kebijakan impor terhadap ketahanan pangan di Indonesia: analisis ketergantungan dan dampaknya pada petani lokal*. Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI KPPN Watampone. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/berita-terbaru/3689-dampak-kebijakan-impor-terhadap-ketahanan-pangan-di-indonesia.html>
- Widi, H. (2025, Januari 2). Problem pelik pangan pembuka tahun 2025. *Kompas*, 10.

